



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AKHMAD SODIQ**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK**
3. NHK : **109806**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 505 m²/416 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 1051 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 1129 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 1050 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.000.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1,0 G A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 34.551.933**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 1.882.551.933

III. HUTANG Rp. 350.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.532.551.933



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.